

# **SKRIPSI**

## **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGANGGURAN DI KABUPATEN BONE**

**SAMSUALAM**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

# **SKRIPSI**

## **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGANGGURAN DI KABUPATEN BONE**

**Sebagai salah satu persyaratan untuk  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi**

disusun dan diajukan oleh :

**SAMSUALAM  
A111 14 028**



Kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

# SKRIPSI

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGANGGURAN DI KABUPATEN BONE

disusun dan diajukan oleh :

**SAMSUALAM**  
**A111 14 028**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 17 Juli 2021

Pembimbing I

ACC Ujian Skripsi  
17/07/2021

  
**Prof. Dr. Nursini, SE., MA.**  
Nip : 19660717 199103 2 001

Pembimbing II

  
**Dr. Hamrullah, SE., M.Si., CSF.**  
Nip : 19681221 199512 1 001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



  
**Drs. Sanusi Fattah, S.,M.Si.,CSF.,CMW®.**  
Nip 19690413 199403 1 003

# SKRIPSI

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGANGGURAN DI KABUPATEN BONE

Disusun dan diajukan oleh

**SAMSUALAM**

**A111 14 028**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Pada tanggal **29 Juli 2021** dan

dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Nursini, SE., MA.	Ketua	
2	Dr. Hamrullah, SE., M.Si., CSF	Sekretaris	
3	Dr. Fatmawati, SE., M.Si., CMW®	Anggota	
4	Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CMW®	Anggota	

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi & Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CMW®  
NIP 19690413 199403 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samsualam  
NIM : A11114028  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Program Studi : Strata Satu S.1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :

### **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGANGGURAN DI KABUPATEN BONE**

adalah hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah saya di dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 30 Juli 2021

Yang membuat pernyataan

A 2000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '2000', and 'METERAI TEMPEL'. The serial number '9DC4DAJX005188751' is visible at the bottom of the stamp.

Samsualam

## **PRAKATA**

### **Assalamu Alaikum Wr. Wb**

Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang pemberi petunjuk, tempat kita memasrahkan segalanya, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Mendatangkan Manfaat, Sholawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan kita, manusia teladan kita, Rasulullah Muhammad SWT, beserta para sahabat, dan para pengikut beliau sampai akhir zaman, amin.

Alhamdulillah Robbil'aalamiin, tiada kata yang dapat penulis sampaikan kecuali rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, atas pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Bone".

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini telah menyita banyak waktu, tenaga, dan curahan pikiran serta materi dari semua pihak dalam memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis. Untuk itu perkenankanlah dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si.,CIPM.,CWM.,CRA.,CRP. Selaku Dekan pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
2. Drs. Sanusi Fattah, SE., M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Ibu Prof. Dr. Nursini, SE., MA. sebagai pembimbing I dan bapak Dr. Hamrullah, SE., M.Si. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis kearah penyempurnaan skripsi ini.

4. Semua Dosen dan Staf pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
5. Pimpinan Kepala Kantor Pemerintahan Kabupaten Bone beserta staf yang telah menerima dan memberikan data-data yang diperlukan.
6. Kedua orang tua tercinta serta saudara-saudaraku yang tercinta yang telah menjadi support bagi keberhasilan penulis selama ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang turut mendukung keberhasilan ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini mempunyai banyak manfaat bagi semua pihak. Wassalamualaikum Wr, Wb.

## ABSTRAK

### Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Bone

#### *Factors Affecting the Unemployment Rate in Bone District*

Samsualam  
Nursini  
Hamrullah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor pertumbuhan ekonomi, inflasi dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Bone. Untuk mengimplementasikan tujuan tersebut maka digunakan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner, sedangkan teknik analisis data dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, tingkat inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, serta upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Bone.

**Kata Kunci** : Faktor pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum, dan tingkat pengangguran

*This study aims to determine and analyze the influence of economic growth factors, inflation and minimum wages on various levels in Bone Regency. To implement these objectives, data collection techniques were used through the distribution of questionnaires, while the data analysis techniques used multiple linear regression analysis. The results of the study found that economic growth had a negative and significant effect on interest rates, the inflation rate had a positive and significant effect on interest rates, and a minimum impact on negative and significant impacts on interest rates in Bone Regency.*

**Keywords** : *Economic growth factor, inflation, minimum wage, and unemployment rate*

# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PRAKATA .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Kegunaan Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
2.1. Tinjauan Teori dan Konsep .....	9
2.1.1 Pengangguran .....	9
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi .....	11
2.1.3 Inflasi .....	14
2.1.4 Upah Minimum.....	18
2.1.5 Hubungan Antara Variabel .....	30
2.1.5.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkat Pengangguran .....	23
2.1.5.2 Hubungan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran.....	25
2.1.5.3 Hubungan Upah Minimum dengan Tingkat Pengangguran.....	25
2.2. Studi Empiris .....	26
2.3. Kerangka Pikir Penelitian .....	29
2.4. Hipotesis .....	29

BAB III	METODE PENELITIAN .....	31
	3.1. Lokasi Penelitian .....	31
	3.2. Jenis Penelitian dan Sumber Data .....	31
	3.3. Metode Pengumpulan Data .....	31
	3.4. Metode Analisis Data .....	31
	3.5. Definisi Operasional Variabel.....	36
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	38
	4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	38
	4.1.1. Sejarah Kabupaten Bone .....	38
	4.1.2. Letak Geografis dan Administratif Wilayah .....	40
	4.1.3. Iklim .....	44
	4.2. Hasil Penelitian .....	44
	4.2.1. Deskripsi Variabel Penelitian.....	44
	4.2.2. Statistik Deskriptif .....	49
	4.2.3. Uji Asumsi Klasik .....	50
	4.2.4. Analisis Regresi Linear Berganda .....	55
	4.2.5. Pengujian Hipotesis .....	57
	4.3. Pembahasan.....	59
BAB V	PENUTUP .....	62
	5.1. Kesimpulan .....	62
	5.2. Saran-saran .....	62
	DAFTAR PUSTAKA .....	64

## DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	Halaman
1.1	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2018 .....	4
1.2	Tingkat Inflasi Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2018 .....	5
1.3	Rata-rata Upah/Gaji Bersih Selama Sebulan Buruh/Karyawan Provinsi Sulawesi Selatan 2012 – 2018 .....	6
4.1	Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan Kabupaten Bone Tahun 2018 .....	42
4.2	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone tahun 2018	43
4.3	Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum Dan tingkat pengangguran di Kabupaten Bone tahun 2005-2019 .....	45
4.4	Perubahan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bone Tahun 2005-2019 .....	46
4.5	Pertumbuhan Tingkat Inflasi di Kabupaten Bone Tahun 2005-2019 .	47
4.6	Pertumbuhan Upah Minimum di Kabupaten Bone Tahun 2005 – 2019	48
4.7	Analisis Pertumbuhan Tingkat Pengangguran di Kabupaten Bone Tahun 2005-2019 .....	49
4.8	Statistik Deskriptif .....	50
4.9	Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov Test .....	51
4.10	Hasil Uji Multikolinieritas .....	52
4.11	Hasil Uji Heterokedastisitas .....	53
4.12	Hasil Uji Autokorelasi .....	54
4.13	Hasil Olahan Data Regresi dengan SPSS release 23 .....	55
4.14	Model Summary .....	56
4.15	Uji Parsial (Uji t) .....	58
4.16	Anova .....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir Penelitian .....	59
------------	---------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih dalam tahap pembangunan ekonomi yang memiliki tujuan untuk mencapai suatu kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro, 2000). Oleh karenanya, pembangunan ekonomi tidak dapat diukur semata-mata dari tingkat pertumbuhan pendapatan atau pendapatan perkapita, namun harus pula melihat bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan kepada penduduk dan mengetahui siapa yang mendapat manfaat dari pembangunan tersebut. Pertumbuhan ekonomi belum dapat dikatakan berhasil jika beban sosial semakin berat, pengangguran semakin meningkat, distribusi pendapatan tidak merata dan jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan juga semakin meningkat.

Pembangunan ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian, salah satu diantaranya dari tingkat pengangguran. Melalui tingkat pengangguran kita dapat melihat tingkat kesejahteraan masyarakat serta tingkat distribusi pendapatan. Pengangguran yang terjadi akan berdampak pada kehidupan sosial yaitu tingkat kriminal dan kekerasan, hal ini akan berpengaruh pada stabilitas dan pembangunan ekonomi akan terhambat serta kesejahteraan akan menurun.

Pengangguran terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang disebabkan karena rendahnya pertumbuhan penciptaan lapangan kerja. Pengangguran sendiri merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sukirno, 2008).

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dari tahun - ketahun mengakibatkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan lapangan pekerjaan dengan bertambahnya tenaga kerja. Hal itu akan menimbulkan kelebihan penawaran tenaga kerja daripada permintaannya, sehingga memunculkan fenomena pengangguran. Di satu sisi, pengangguran menunjukkan adanya selisih antara permintaan (*demand of labour*) dan penawaran tenaga kerja (*supply of labour*) dalam suatu perekonomian. Sedangkan penambahan penduduk yang semakin pesat dan semakin besar jumlahnya menyebabkan masalah pengangguran menjadi bertambah buruk (Budiarto, 1985).

Tingkat pengangguran juga merupakan kunci dari kinerja perekonomian. Tingkat pengangguran menunjukkan persentase dari angkatan kerja yang tidak bekerja. Penyediaan lapangan kerja dipengaruhi oleh tingkat produksi dan pengeluaran perusahaan. Penurunan tingkat pengangguran menjadi indikator yang baik bagi perekonomian. Hal ini dikarenakan perusahaan yang menambah tenaga kerja dianggap berhasil menaikkan produksi dan penjualan. Meskipun demikian, tingkat pengangguran dan jumlah penduduk yang bekerja dapat naik dalam waktu yang sama (Kaufman dan Hotchkiss, 1999).

Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah dipahami. Apabila

pengangguran tersebut tidak segera diatasi maka dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan (BPS, 2016).

Masalah ini cukup rumit sehingga berbagai usaha ataupun kebijakan perlu dilakukan pemerintah untuk dapat mengatasinya, dengan tujuan dapat berupah; 1) tujuan bersifat ekonomi, yang dalam hal ini ada tiga pertimbangan utama: untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru, untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat dan memperbaiki kesamarataan pembagian pendapatan. 2) tujuan bersifat sosial politik yaitu pertimbangannya untuk meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga, menghindari masalah kejahatan dan untuk mewujudkan kestabilan politik (Sukirno, 2008).

Selama ini, berbagai kebijakan dibuat disetiap pemerintahan untuk menanggulangi masalah pengangguran, kebijakan yang didesain secara sentralistik oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini dimentori oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), merancang berbagai program untuk dapat mengatasi masalah pengangguran. Program tersebut diantaranya, memberikan pendidikan gratis untuk meningkatkan taraf pendidikan, pelatihan tenaga kerja disetiap daerah, job fair, serta bimbingan dan bantuan untuk berwirausaha.

Di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri khususnya pada Kabupaten Bone, masalah tingkat pengangguran juga merupakan isu penting yang menjadi permasalahan tahunan dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Bone. Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat juga harus mengambil bagian dalam menyelesaikan masalah pengangguran yang ada dengan memanfaatkan dana dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran di Kabupaten Bone setiap tahunnya masih terbilang cukup besar, seiring dengan meningkatnya

pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Berikut tabel pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di Kabupaten Bone.

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi**  
**Kabupaten Bone Tahun 2012 - 2018**

<b>Tahun</b>	<b>Tingkat pengangguran (%)</b>	<b>Pertumbuhan Eknonomi (%)</b>
2012	3.51	8.01
2013	6.80	6.09
2014	4.96	8.92
2015	4.36	8.30
2016	3.40	9.01
2017	4.55	8.41
2018	2.82	8.90

*Sumber : Bone Dalam Angka 2012 sampai 2018, diolah.*

Tabel 1.1 di atas menggambarkan bahwa, berdasarkan berita resmi Badan Pusat Statistik tahun 2012 hingga 2018, jumlah pengangguran mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai tahun 2017 dengan persentase sebesar 4.55%, dan setelah itu mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar 2.82%. Pertumbuhan ekonomi juga cenderung meningkat selama periode waktu 2012 hingga 2018. Dengan meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi di harapkan mampu menekan tingkat pengangguran. Akan tetapi, yang terjadi di Kabupaten Bone justru semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga menaikkan angka pengangguran. Data tersebut menunjukkan bahwa naiknya pertumbuhan ekonomi tidak berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bone, serta tidak meningkatkan standar hidup karena masih ada kesulitan dalam mencari pekerjaan.

Berkaitan dengan upaya mengurangi tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi memang merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi berkurangnya tingkat pengangguran di Kabupaten Bone. Selain pertumbuhan

ekonomi, tingkat inflasi juga memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Bone. Jika inflasi berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan, hal ini sangat baik bagi perekonomian Kabupaten Bone karena semakin kecil angka inflasi maka semakin berkurang juga angka pengangguran. Berikut ini akan disajikan laju inflasi di Kabupaten Bone melalui tabel berikut ini :

**Tabel 1.2**  
**Tingkat Inflasi Kabupaten Bone Tahun 2012 - 2018**

Tahun	Tingkat Inflasi (%)
2012	3.65
2013	6.86
2014	8.22
2015	0.97
2016	1,48
2017	5.54
2018	4.69

*Sumber : Bone Dalam Angka 2012 sampai 2018, diolah.*

Tabel 1.2 di atas juga memperlihatkan bahwa dari data statistik tingkat inflasi di Kabupaten Bone yang diperoleh dari tahun 2012 hingga 2018, tingkat inflasi mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga 2014 sebesar 8,22%, dan cenderung berfluktuasi dan mengalami penurunan yang cukup drastis dari tahun 2015 sampai tahun 2018, dibandingkan tahun sebelumnya yang cenderung mengalami peningkatan, yang berarti sangat baik bagi perekonomian di Kabupaten Bone. Akan tetapi dari data tersebut, inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Bone yang cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2014.

Di sisi lain, besaran Upah Minimum yang ditetapkan di Kabupaten Bone juga memiliki peranan dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran di kabupaten tersebut. Menurut para ahli ekonomi, peningkatan yang terjadi pada

upah minimum berkorelasi positif dengan tingkat pengangguran, dimana semakin tinggi upah minimum maka semakin sedikit permintaan terhadap tenaga kerja yang berarti semakin banyak pengangguran. Berikut adalah data rata-rata upah/gaji bersih selama sebulan buruh/karyawan di Provinsi Sulawesi Selatan.

**Tabel 1.3**  
**Rata-rata Upah/Gaji Bersih Selama Sebulan Buruh/Karyawan Provinsi Sulawesi Selatan 2012 – 2018**

Tahun	Upah Minimum (Rp)
2012	1.200.000
2013	1.440.000
2014	1.800.000
2015	2.000.000
2016	2.250.000
2017	2.692.208
2018	2.764.748

*Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012- 2018, diolah.*

Tabel 1.3 di atas memperlihatkan tingkat rata-rata upah di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk diterapkan di setiap kabupaten khususnya di Kabupaten Bone, dimana upah minimum tersebut selalu meningkat sejak tahun 2012 hingga 2018. Upah minimum yang selalu meningkat tersebut seharusnya menjadi kabar baik bagi perekonomian di Kabupaten Bone, karna akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun, yang terjadi justru dengan semakin meningkatnya upah setiap tahunnya tidak berpengaruh besar terhadap tingkat pengangguran di kabupaten bone yang terus meningkat. Karna dengan naiknya tingkat upah tersebut justru akan mengurangi tingkat permintaan tenaga kerja yang kemudian berakibat pada meningkatnya pengangguran.

Jika masalah pengangguran yang seperti ini dibiarkan berlarut-larut maka sangat besar kemungkinannya untuk mendorong suatu krisis sosial yang terjadi,

tidak saja menimpa para pencari kerja yang baru lulus sekolah, melainkan juga menimpa orang tua yang kehilangan pekerjaan karena kantor dan pabriknya tutup. Indikator masalah sosial juga menjadi penyebab pengangguran di Kabupaten Bone, bisa dilihat dari begitu banyaknya anak-anak yang mulai turun ke jalan. Mereka menjadi pengamen, pedagang asongan maupun pelaku tindak kriminalitas. Mereka adalah generasi yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan maupun pembinaan yang baik. Sehubungan dengan latar belakang diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Bone”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh faktor Pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Bone?
2. Bagaimana pengaruh faktor inflasi terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Bone?
3. Bagaimana pengaruh faktor upah minimum terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Bone?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Bone.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Bone.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Bone.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini akan memberikan tambahan wawasan tentang studi tingkat pengangguran dan dapat menambah pengalaman di bidang penelitian.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi instansi terkait untuk menyusun kebijakan yang akan berpengaruh dan mampu mengatasi masalah pengangguran.
3. Bagi khazanah ilmu pengetahuan, penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam wacana tingkat pengangguran dan diharapkan dapat ikut mengisi ruang yang masih cukup lebar bagi penelitian pengangguran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teoritis**

##### **2.1.1 Pengangguran**

Pengangguran merupakan suatu persoalan yang banyak terjadi di suatu wilayah khususnya pada negara berkembang. Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan oleh jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada (Albertus Aditya, 2016). Serupa dengan pengertian di atas, Sukirno (2004) mengatakan bahwa pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Tingkat pengangguran menunjukkan persentase dari individu-individu yang ingin bekerja namun tidak memiliki pekerjaan. Seseorang dianggap menjadi penganggur jika tidak bekerja namun masih menunggu untuk mendapatkan pekerjaan.

Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan di pasar tenaga kerja. Pada pasar tenaga kerja dikenal kurva permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kurva permintaan tenaga kerja menunjukkan jumlah tenaga kerja yang diminta/dipekerjakan oleh perusahaan dan memiliki kemiringan negatif pada tingkat upah tertentu, sedangkan kurva penawaran tenaga kerja menunjukkan jumlah tenaga kerja yang akan ditawarkan oleh rumah tangga dan berslope positif terhadap upah. Keseimbangan pasar akan tercapai apabila terjadi suatu

keadaan dimana jumlah tenaga kerja yang diminta sama dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan pada tingkat upah tertentu (Widiyati, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa apabila jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta maka akan mengakibatkan pengangguran.

Menurut Teori Keynes yang menjelaskan bahwa masalah pengangguran timbul disebabkan oleh adanya permintaan agregat yang rendah. Permintaan agregat merupakan seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang terjadi dalam suatu perekonomian. Ketika penawaran tenaga kerja mengalami peningkatan maka upah akan turun dan penurunan upah tersebut akan mengakibatkan kerugian bukan menguntungkan karena penurunan upah tersebut menggambarkan daya beli masyarakat terhadap suatu barang. Daya beli masyarakat yang merupakan salah satu indikator dalam IPM yang rendah akan mengakibatkan perusahaan menurunkan jumlah produksinya dan tidak dapat menyerap kelebihan tenaga kerja sehingga permintaan dan penawaran tenaga kerja hampir tidak pernah seimbang dan pengangguran sering terjadi (Sukirno, 2006).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Menurut Hasyim (2017) pengangguran merupakan masalah strategi dalam perekonomian secara makro, karena berpengaruh langsung kepada standar kehidupan dan tekanan psikologis masyarakat. Sedangkan menurut Nanga (2001) pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan.

Pengangguran atau bisa disebut juga tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran merupakan masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran produktivitas dan pendapatan masyarakat berkurang sehingga menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

### **2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan relatif nilai barang dan jasa dalam satu periode (satu tahun). Pertambahan nilai barang dan jasa ini dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai barang dan jasa dalam PDRB meningkat karena jumlah dan harga dari barang dan jasa itu sendiri. Untuk menghilangkan pengaruh kenaikan harga, maka pertumbuhan ekonomi dihitung dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan.

Menurut Sadono Sukirno (2008) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dengan demikian untuk menentukan laju pertumbuhan ekonomi yang perlu dicapai perlu dihitung adalah pendapatan nasional riil menurut harga tetap yaitu harga berlaku ditahun dasar yang dipilih. Sehingga dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya Pertumbuhan Domestik Regional Bruto per kapita (PDRB per kapita). PDRB menurut Badan Pusat Statistik (2018) yaitu jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir

yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Menurut departemen statistik ekonomi dan moneter dari Bank Indonesia (2004), PDRB terdiri dari PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kinerja yang menggambarkan hasil dari pembangunan yang telah dicapai. Indikator ini penting bagi daerah karena dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah atas keberhasilan pembangunan yang telah dicapai sekaligus sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan di masa yang akan datang.

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik terutama menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh penambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2008).

Menurut ahli-ahli klasik hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak akan terus menerus berlangsung. Pada permulaannya, apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam relatif berlebihan, tingkat pengembalian modal dari investasi yang dibuat adalah tinggi, para pengusaha akan mendapatkan keuntungan yang besar. Hal ini akan menimbulkan investasi baru, dan pertumbuhan ekonomi terwujud.

Menurut Nainggolan (2009), mengatakan bahwa terdapat adanya pengaruh PDRB dan jumlah pengangguran yang bersifat positif dalam Teori Pertumbuhan Ekonomi. Dikatakan berpengaruh positif sebab pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi oleh peningkatan kapasitas produksi, sehingga jumlah pengangguran tetap meningkat seiring pertumbuhan ekonomi yang berlangsung. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat tersebut berorientasi pada padat modal, dimana kegiatan produksi untuk memacu output dan menghasilkan pendapatan yang meningkat lebih diutamakan ketimbang pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada padat karya.

Menurut Sukirno (2008) pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dengan demikian untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai perlu dihitung pendapatan nasional riil menurut harga tetap yaitu pada harga-harga yang berlaku ditahun dasar yang dipilih. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian.

Output atau pendapatan nasional merupakan ukuran paling komprehensif dari tingkat aktivitas ekonomi suatu Negara. Salah satu ukuran yang lazim digunakan untuk output adalah (GDP). GDP dapat dilihat sebagai perekonomian total dari setiap orang di dalam perekonomian atau sebagai pengeluaran total pada output barang dan jasa perekonomian (Mankiw, 2003). Output ini dinyatakan dalam satuan mata uang (rupiah) sebagai jumlah dari total keluaran barang dan jasa dikalikan dengan harga per unitnya. Jumlah total tersebut sering disebut sebagai output nominal, yang dapat berubah karena perubahan baik jumlah fisik maupun perubahan harga terhadap periode dasarnya.

### 2.1.3 Inflasi

Menurut Bank Indonesia, secara sederhana inflasi adalah diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Kecenderungan meningkat yang terus menerus merupakan syarat, kenaikan harga karena misalnya, musiman, menjelang hari-hari besar atau yang terjadi sekali saja tidak dapat disebut sebagai inflasi.

Menurut Nopirin (2012) bahwa inflasi adalah proses kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus. Ini tidak berarti bahwa harga beberapa macam barang itu naik dengan presentasi yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan. Yang penting terdapat kenaikan harga barang umum secara terus menerus selama satu periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja (meskipun presentasi cukup besar) bukanlah merupakan inflasi.

Sukirno (2008) mengatakan bahwa inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus.

Kemudian Boediono (1999) menyatakan bahwa definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain. Kenaikan harga-harga karena musiman, menjelang hari-hari besar, atau yang terjadi sekali saja (dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan) tidak disebut inflasi. Serupa dengan pendapat di atas, Sukirno (2002) menyatakan bahwa inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian.

Inflasi juga dikatakan sebagai tarikan permintaan, karena inflasi biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Sedangkan Inflasi desakan biaya, yaitu Inflasi yang berlaku pada masa perekonomian berkembang dengan pesat dan tingkat pengangguran sangat rendah.

Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus (Natsir, 2014). Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) yaitu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Tiga langkah yang diperlukan untuk membentuk indeks harga yaitu:

- a. Memilih tahun dasar, yaitu tahun yang menjadi titik tolak dalam membandingkan perubahan harga.
- b. Menentukan jenis-jenis barang yang perubahannya harganya akan diamati untuk membentuk indeks harga.
- c. Menghitung indeks harga.

Dalam perhitungan indeks harga, perlu ditentukan-weights atau kepentingan relatif setiap kelompok barang dalam konsumsi masyarakat. Selanjutnya, perhitungan indeks harga dibandingkan dengan indeks harga tahun lainnya (tahun sebelumnya) untuk mendapatkan nilai tingkat inflasi.

Sebelum kebijaksanaan inflasi timbul, perlu terlebih dahulu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya inflasi. Ada dua faktor yang utama, Nopirin (2000) yaitu :

a. *Demand Pull Inflation*

Inflasi ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total (*agregat demand*). Sedangkan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh. Apabila kesempatan kerja penuh (*full employment*) telah tercapai, penambahan permintaan selanjutnya hanyalah akan menaikkan harga saja (sering disebut dengan Inflasi murni). Apabila kenaikan permintaan ini menyebabkan keseimbangan GNP berada di atas/melebihi GNP pada kesempatan kerja penuh maka akan terdapat adanya *inflationary gap*. *Inflationary gap* inilah yang akan menyebabkan inflasi.

b. *Cost Pust Inflation*

*Cost pust inflation* ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi. Jadi inflasi yang dibarengi dengan resesi. Keadaan ini timbul dimulai dengan adanya penurunan dalam penawaran total (*agregat supply*) sebagai akibat kenaikan biaya produksi. Kenaikan produksi akan menaikkan harga dan turunnya produksi. Serikat buruh yang menuntut kenaikan upah, manajer dalam pasar monopolistis yang dapat menentukan harga (yang lebih tinggi), atau kenaikan harga bahan baku, misalnya krisis minyak adalah faktor yang dapat menaikkan biaya produksi, atau terjadi penawaran total (*aggregate supply*) sebagai akibat kenaikan biaya produksi.

Natsir (2014) jenis-jenis inflasi yaitu :

a. Inflasi secara umum, terdiri dari:

- 1) Inflasi IHK atau inflasi umum (*headline inflation*) adalah inflasi seluruh barang dan jasa yang dimonitor harganya secara periodik. Inflasi IHK merupakan gabungan dari inflasi inti, inflasi harga administrasi dan inflasi gejala barang (*volatile goods*).
- 2) Inflasi inti (*core inflation*) adalah inflasi barang dan jasa yang perkembangannya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara

umum (faktor-faktor fundamental misalnya akseptasi inflasi, nilai tukar, dan keseimbangan permintaan dan penawaran) yang akan berdampak pada perubahan harga-harga secara umum yang sifatnya cenderung permanen dan persisten.

- 3) Inflasi harga administrasi (*administered price inflation*) adalah inflasi yang harganya diatur oleh pemerintah terjadi karena campur tangan (diatur) pemerintah, misalnya kenaikan harga BBM, angkutan dalam kota dan kenaikan tarif tol.
  - 4) Inflasi gejalak barang-barang (*volatile goods inflation*) adalah inflasi kelompok komoditas (barang dan jasa) yang perkembangan harganya sangat bergejalak. Misalnya, bahan makanan yang bergejalak terjadi pada kelompok bahan makanan yang dipengaruhi faktor-faktor teknis, misalnya gagal panen, gangguan alam atau anolai cuaca.
- b. Inflasi berdasarkan asalnya, terdiri dari:
- 1) Inflasi yang berasal dari dalam negeri adalah inflasi barang dan jasa secara umum di dalam negeri.
  - 2) Inflasi yang berasal dari manca negara adalah inflasi barang dan jasa (barang dan jasa yang diimpor) secara umum di luar negeri.
- c. Inflasi berdasarkan cakupan pengaruhnya, terdiri dari:
- 1) Inflasi tertutup (*closed inflation*) adalah inflasi yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau beberapa barang tertentu.
  - 2) Inflasi terbuka (*open inflation*) adalah inflasi yang terjadi pada semua barang dan jasa secara umum.
- d. Inflasi berdasarkan sifatnya, terdiri dari:
- 1) Inflasi merayap (*creeping inflation*) adalah inflasi yang rendah dan berjalan lambat dengan presentase yang relatif kecil serta dalam waktu yang relatif lama.

- 2) Inflasi menengah (*galloping inflation*) adalah inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan seringkali berlangsung dalam periode waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi.
  - 3) Inflasi tinggi (hiper inflasi) adalah inflasi yang paling parah ditandai dengan kenaikan harga mencapai 5 atau 6 kali, pada saat ini nilai uang merosot tajam.
- e. Inflasi berdasarkan tingkat pengaruhnya
- 1) Inflasi ringan adalah inflasi yang besarnya <10% per tahun.
  - 2) Inflasi sedang adalah inflasi yang besarnya antara 10%-30% per tahun.
  - 3) Inflasi berat adalah inflasi yang besarnya antara 30%-100% per tahun.
  - 4) Inflasi hiper adalah yang besarnya >100% per tahun.
- f. Inflasi berdasarkan periode, terbagi menjadi tiga, antara lain:
- 1) Inflasi tahunan (*year on year*), yaitu mengukur IHK periode bulan ini terhadap IHK di periode bulan yang sama di tahun sebelumnya.
  - 2) Inflasi bulanan (*month to month*), mengukur IHK bulan ini terhadap IHK bulan sebelumnya.
  - 3) Inflasi kalender atau (*year to date*), mengukur IHK bulan ini terhadap IHK awal tahun.

#### **2.1.4 Upah Minimum**

Upah adalah suatu penerimaan berupa imbalan dari pemberi kerja yang diberikan kepada penerima kerja atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Semakin tinggi tingkat upah, semakin kecil permintaan pengusaha akan tenaga kerja. Kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya jumlah tenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran (Haryani, 2002). Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan

upah kepada pekerja di lingkungan usaha atau kerjanya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Pasal 41 ayat 2, “upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas: a. upah tanpa tunjangan; atau b. upah pokok termasuk tunjangan tetap”. Peraturan Pemerintah ini juga menegaskan bahwa upah minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Sementara itu, upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan.

Seperti yang telah diterangkan bahwa pendapatan yang dihasilkan para pekerja/buruh dalam suatu perusahaan sangat berperan dalam hubungan perburuhan. Bertitik tolak dari hubungan formal ini haruslah tidak dilupakan bahwa seorang pekerja/buruh adalah seorang manusia dan dilihat dari segi kemanusiaan, sewajarnya kalau pekerja/buruh itu mendapatkan penghargaan yang wajar dan perlindungan yang wajar. Dalam hal ini upah minimum sebaiknya dapat mencukupi kebutuhan hidup pekerja/buruh itu beserta keluarganya (Kartasapoetra, 2004:101)

Upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak yaitu setiap penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Pencapaian kebutuhan hidup layak perlu dilakukan secara bertahap karena kebutuhan hidup minimum yang sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dunia usaha (Hardijan Rusli, 2004).

Berdasarkan peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 07 tahun 2013 tentang upah minimum pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman Dasar

dan wewenang penetapan upah minimum sebagaimana dijelaskan dalam peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 07 tahun 2013 tentang upah minimum pasal 3 adalah

- 1) Penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi.
- 2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pencapaian KHL.
- 3) Pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbandingan besarnya upah minimum terhadap nilai KHL pada periode yang sama.
- 4) Untuk pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menetapkan tahapan pencapaian KHL dalam bentuk peta jalan pencapaian KHL bagi perusahaan industry padat karya tertentu dan bagi perusahaan lainnya dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan dunia usaha.

Menurut Mankiw (2003) bahwa pengangguran juga disebabkan oleh kekakuan upah yaitu kegagalan upah dalam menyeimbangkan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Salah satu hal yang menyebabkan kekakuan upah adalah undang-undang kebijakan upah minimum. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2016), upah minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimum sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan.

Menurut Suparmoko (2011) menjelaskan bahwa penetapan upah minimum akan memberikan dampak pada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Penetapan upah minimum akan mengurangi tingkat permintaan tenaga kerja dan

akan menaikkan penawaran tenaga kerja sehingga menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara upah minimum dan pengangguran.

Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa jenis upah minimum sebagai berikut :

- a) Upah minimum sub sektoral regional; upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan pada sub sektor tertentu dalam daerah tertentu;
- b) Upah minimum sektoral regional, upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan pada sektor tertentu dalam daerah tertentu;
- c) Upah minimum regional/upah minimum provinsi, upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan dalam daerah tertentu. Upah minimum regional (UMR)/UMP di tiap-tiap daerah besarnya berbeda-beda. Besarnya UMR/UMP didasarkan pada indeks harga konsumen, kebutuhan fisik minimum, perluasan kesempatan kerja, upah pada umumnya yang berlaku secara regional, kelangsungan dan perkembangan perusahaan, tingkat perkembangan perekonomian regional dan nasional.

Upah minimum ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan/atau bupati/walikota. Pengusaha dilarang membayar upah pekerja atau buruh dibawah upah minimum daerah dimana pekerja/buruh tersebut bekerja, termasuk kepada pekerja atau buruh yang sedang dalam masa percobaan 3 (tiga) bulan pertama. Pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dapat diancam pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pasal 186 ayat 1 Undang-undang No. 13 tahun 2003. Dalam hal apabila pengusaha belum mampu

membayar upah sebesar upah minimum maka dapat mengajukan penundaan ke instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan untuk kurun waktu tertentu. Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum diajukan pengusaha kepada gubernur melalui instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan tingkat provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal upah minimum berlaku. Permohonan penangguhan diajukan berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat dan berhak melakukan perundingan dengan pengusaha. Apabila perusahaan tersebut belum terbentuk serikat pekerja/serikat buruh, maka perundingan untuk menyepakati penundaan pemberlakuan upah minimum dilakukan antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang mendapat mandat untuk mewakili lebih dari 50% (lima puluh) pekerja/buruh yang menerima upah minimum diperusahaan bersangkutan.

Permohonan penangguhan harus dilampiri dengan :

- a) Naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada perusahaan bersangkutan;
- b) Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba/rugi, beserta penjelasan-penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir. Apabila perusahaan tersebut telah berbadan hukum, maka laporan keuangan harus diaudit oleh akuntan public;
- c) Salinan akta pendirian perusahaan
- d) Data upah menurut jabatan pekerja/buruh
- e) Jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimumnya;
- f) Perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang.

## **2.1.5. Hubungan Antar Variabel**

### **2.1.5.1. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengangguran**

Arthur Okun mengemukakan sebuah teori yang mempelajari hubungan antara tingkat pengangguran dengan GDP (dalam hal ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi) yang dikenal sebagai Hukum Okun. Konsep dari Hukum Okun didasari oleh hasil observasi terhadap data GDP Amerika Serikat. Hukum Okun menjelaskan bahwa tingkat pengangguran memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan GDP. Hal ini menjelaskan, jika GDP mengalami kenaikan, maka tingkat pengangguran akan turun. Jika GDP tidak mengalami pertumbuhan, maka tingkat pengangguran akan tetap pada tingkat yang sama, bahkan akan naik sebesar 1,5% dari kondisi sebelumnya (Mankiw, 2006).

Faktor-faktor yang menyebabkan pengangguran seperti output yang dikemukakan oleh Arthur Okun. Output dapat diilustrasikan sebagai salah satu indikasi untuk melihat adanya kesempatan kerja. Suatu periode dimana output lebih tinggi dari titik potensialnya, maka akan tersedia kesempatan kerja yang lebih banyak. Pada kondisi ini, pengangguran akan dapat ditekan atau bahkan akan menurun.

Arsyad (2000) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi daerah secara langsung ataupun tidak langsung akan menciptakan lapangan kerja.

Secara teori setiap adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan peningkatan atau

penurunan PDRB yang dihasilkan suatu daerah, karena indikator yang berhubungan dengan jumlah pengangguran adalah PDRB (Alghofari, 2010).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda, hubungan pertumbuhan ekonomi dan jumlah pengangguran bersifat positif dan negatif. Pertumbuhan ekonomi melalui PDRB yang bersifat positif dikarenakan pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi oleh peningkatan kapasitas produksi, sehingga pengangguran tetap meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat ini berorientasi pada padat modal, dimana kegiatan produksi untuk memacu *output* dan menghasilkan pendapatan yang meningkat lebih diutamakan ketimbang pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada padat karya.

Penelitian lain yang menyatakan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah pengangguran berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat di Indonesia memberikan peluang kerja baru ataupun memberikan kesempatan kerja dan berorientasi pada padat karya, sehingga pertumbuhan ekonomi mengurangi jumlah pengangguran.

Tolok ukur dari keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah diantaranya adalah PDRB daerah tersebut dan pertumbuhan penduduk yang bermuara pada tingkat kesempatan kerja. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan faktor - faktor produksi. PDRB juga merupakan jumlah dari nilai tambah yang diciptakan dari seluruh aktivitas ekonomi suatu daerah atau sebagai nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah. Mengambil analisis makro Produk Domestik Regional Bruto dapat dihitung berdasarkan harga konstan atau berdasarkan harga berlaku.

### **2.1.5.2. Hubungan Inflasi dengan Pengangguran**

Studi tentang hubungan antara inflasi dan pengangguran pertama kali dilakukan oleh A.W. Phillips (1958) melalui teorinya yang dikenal dengan Kurva Phillips. Kurva ini menjelaskan hubungan antara tingkat inflasi dan pengangguran dimana kurva Phillips dan kurva penawaran agregat cukup konsisten satu sama lain.

Tingkat inflasi juga memiliki hubungan positif atau negatif dengan tingkat pengangguran. Jika tingkat inflasi yang dihitung adalah inflasi yang terjadi pada harga-harga secara umum, maka tingginya tingkat inflasi yang terjadi akan berakibat pada peningkatan pada tingkat bunga (pinjaman). Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif. Hal ini akan berpengaruh pada jumlah pengangguran yang tinggi karena rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya investasi (Sukirno, 2002). Dengan adanya kecenderungan bahwa tingkat inflasi dan pengangguran kedudukannya naik (tidak ada trade off) maka menunjukkan bahwa adanya perbedaan dengan kurva Philips dimana terjadi trade off antara inflasi yang rendah atau pengangguran yang rendah, (Nopirin, 2000).

### **2.1.5.3. Hubungan Upah Minimum dengan Pengangguran**

Semakin tinggi tingkat upah, semakin kecil permintaan pengusaha akan tenaga kerja. Kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya jumlah tenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran (Haryani, 2002). Menurut Todaro (2000, terjemahan Haris Munandar, 2000), semakin tinggi tingkat upah yang ditawarkan kepada tenaga kerja maka akan menurunkan tingkat penyerapan tenaga kerja. Hal ini berarti bahwa pengangguran akan meningkat. Pendapat yang sama dikemukakan oleh

Sumarsono (2003), yaitu besar kecilnya upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Biaya produksi yang tinggi meningkatkan harga produk yang pada akhirnya membuat permintaan terhadap produk berkurang. Kondisi ini memaksa produsen untuk mengurangi jumlah produk yang dihasilkan, yang selanjutnya juga dapat mengurangi permintaan tenaga kerja, termasuk pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran. Serupa dengan pendapat di atas, Ehrenberg dan Smith (1998) dalam Abdul Haris (2013) menyatakan apabila terdapat kenaikan tingkat upah rata-rata, maka akan diikuti oleh turunnya jumlah tenaga kerja yang diminta, berarti akan terjadi pengangguran. Jika dibalik, turunnya tingkat upah rata-rata akan diikuti oleh meningkatnya kesempatan kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja mempunyai hubungan terbalik dengan tingkat upah, artinya pengangguran mempunyai hubungan searah dengan tingkat upah.

## **2.2. Studi Empiris**

Christimulia Purnama Trimurti dan Yeyen Komalasari (2014) dalam penelitiannya yang berjudul "*Determinants of Unemployment: Empirical Evidences from 7 Province in Indonesia*". Penelitian ini menggunakan Pengangguran sebagai variabel dependen dan Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat inflasi, dan Upah minimum sebagai variabel independen. Diperoleh kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Pemerintah Indonesia tidak seharusnya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi fokus pada menciptakan pekerjaan baru untuk mendorong pengangguran. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. Pemerintah Indonesia harus berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya asing dan penguatan rupiah terhadap mata uang lainnya. Peningkatan upah minimum di setiap provinsi juga berpengaruh signifikan

terhadap pengangguran. Kaitan penelitian ini dengan proposal peneliti adalah terdapat variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum dan pengangguran sebagai variabel dependen, namun penelitian pada kutipan Trimurti dan Yeyen mengambil tempat di 7 provinsi di Indonesia, sedang proposal peneliti mengambil tempat di Kabupaten Bone.

A. Thayaparan (2014) dalam jurnalnya yang berjudul "*Impact of Inflation and Economic Growth on Unemployment in Sri Lanka: A Study of Time Series Analysis*". Penelitian ini menggunakan teknologi deret waktu multivariate niques untuk meneliti pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran. Diperoleh kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Sri Lanka yang dimana, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi belum secara statistik berpengaruh signifikan, sementara inflasi berpengaruh negatif dan signifikan pada level 1%. Kaitan penelitian ini dengan proposal peneliti adalah terdapat variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi sebagai variabel independen dan pengangguran sebagai variabel dependen, namun penelitian pada kutipan A. Thayaparan mengambil tempat di Sri Lanka, sedang proposal peneliti mengambil tempat di Kabupaten Bone.

Shkumbim Misini (2017) dalam jurnalnya yang berjudul "*The Effect of Economic in Relation to Unemployment*". Penelitian ini menggunakan variabel Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen dengan metode analisis regresi linear sederhana. Diperoleh kesimpulan bahwa tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi memiliki efek negatif. Pertumbuhan ekonomi di bawah PDB nominal telah mempengaruhi secara umum pengurangan tingkat pengangguran. Tingkat signifikansinya adalah 0.013 yang kurang dari tingkat uji  $F = 0.05$  atau 0.025, dan model tersebut menunjukkan bahwa jika PDB nominal ditingkatkan 1%

maka itu akan berefek negatif terhadap pengurangan pengangguran dengan persentase rata-rata 0.43%.

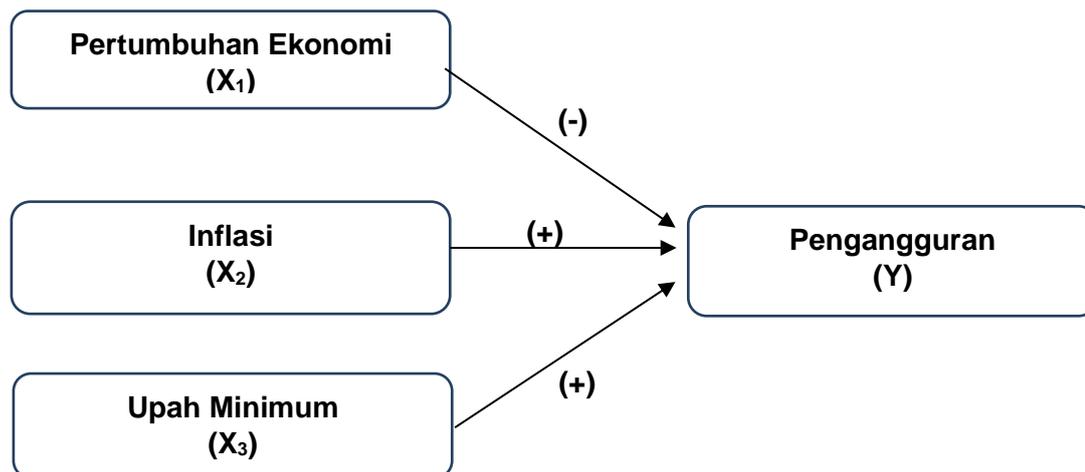
Dra. Sunarsih, MP. (2017) dalam jurnalnya yang berjudul "*Minimum Wage Analysis, Inflation and The Effect of The Unemployment and Purchasing Power Within The Ex Besuki Residence*". Penelitian ini menggunakan Pengangguran sebagai variabel dependen dan Upah minimum, dan Tingkat inflasi sebagai variabel independen. Diperoleh kesimpulan bahwa upah minimum dan inflasi sebagian atau kolektif tidak berpengaruh secara simultan dan signifikan pada pengangguran. Jadi teori Philip tidak berlaku pada penelitian ini. Upah Minimum, secara signifikan mempengaruhi daya beli masyarakat, dan inflasi secara signifikan mempengaruhi daya beli masyarakat. Kaitan skripsi ini dengan proposal peneliti adalah terdapat variabel Upah minimum, inflasi dan pengangguran, namun penelitian pada kutipan Sunarsih mengambil tempat di *Ex Besuki Residence*, sedang proposal peneliti mengambil tempat di Kabupaten Bone.

Nur Feriyanto (2018) dalam penelitiannya yang berjudul "*Determinants of Unemployment in Regency/City in Special Provinces Yogyakarta*". Penelitian ini menggunakan Pengangguran sebagai variabel dependen dan Upah, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, dan Populasi sebagai variabel independen. Diperoleh kesimpulan bahwa upah secara parsial memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap pengangguran, tetapi variabel populasi secara parsial memiliki dampak positif dan signifikan. Pendidikan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak positif dan signifikan. Jadi keempat variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap pengangguran. Kaitan penelitian ini dengan proposal peneliti adalah terdapat variabel upah, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Namun penelitian pada kutipan Nur Feriyanto mengambil tempat di Kota Yogyakarta, sedang proposal peneliti mengambil tempat di Kabupaten Bone.

### 2.3. Kerangka Pikir Penelitian

Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang dilakukan serta untuk memperjelas dasar pemikiran dalam penelitian ini, kerangka pemikiran yang skematis disajikan dalam gambar 2.1 di bawah.

**Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian**



### 2.4. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan rumusan masalah, landasan teoretis, dan penelitian sebelumnya, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh langsung dan negatif terhadap tingkat pengangguran. Meningkatnya tingkat pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Bone.
2. Diduga inflasi berpengaruh langsung dan positif terhadap tingkat pengangguran. Kenaikan tingkat inflasi akan meningkatkan tingkat pengangguran di Kabupaten Bone.

3. Diduga upah minimum berpengaruh langsung dan negatif terhadap tingkat pengangguran. Kenaikan tingkat upah akan menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Bone.